

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
UPAH MINIMUM DAN PENGANGGURAN TERBUKA
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
(Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2009-2013)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Lailatul Istifaiyah
115020100111058**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM DAN PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN (Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2009-2013)

Yang disusun oleh :

Nama : Lailatul Istifaiyah
NIM : 115020100111058
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 25 Mei 2015.

Malang, 25 Mei 2015
Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. M. Pudjihadjo, SE., MS
NIP. 19520415 197412 1 001

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM DAN
PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
(Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2009-2013)**

Lailatul Istifaiyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: lailaistifaiyah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel yang mencakup tujuh Kota/Kabupaten di Gerbangkertasusila selama kurun waktu lima tahun dengan bantuan *software E-views 7*. Data yang diperoleh berasal dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila adalah pertumbuhan ekonomi dan upah minimum. Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kemiskinan

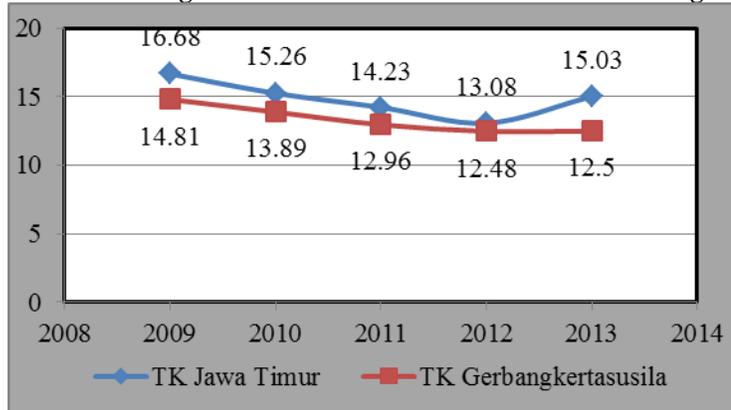
A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator paling penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu Negara. Setiap Negara akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Di banyak Negara di dunia syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia khususnya di Jawa Timur pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (Jonaidi,2012).

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar daerah yang nantinya dapat mengentaskan kondisi kemiskinan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Perda Provinsi Jawa Timur No.4/1996 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dan PP No. 47/1996 tentang RTRW Nasional menetapkan kawasan kerjasama yang dikelompokkan dalam 9 Satuan Wilayah Pembangunan (SWP). Salah satu wilayah pembangunan yang ada di Jawa Timur adalah SWP I Gerbangkertasusila yang di dalam nya terdiri dari 7 Kabupaten/Kota diantaranya adalah Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan.

Keberhasilan Provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, yaitu angka diatas *hard core* atau diatas 10 persen.

Gambar 1: Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur dan Gerbangkertasusila Tahun 2009-2013



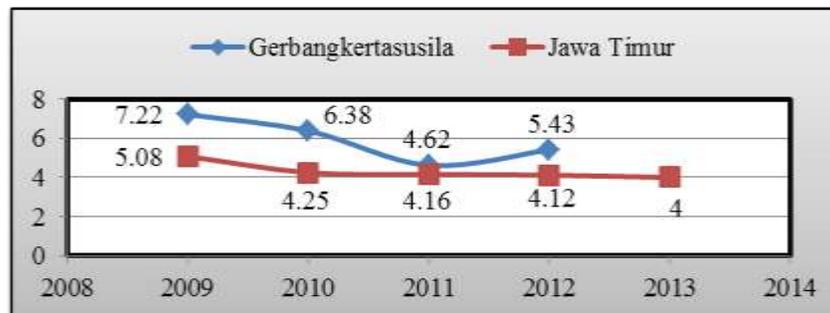
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2009-2013)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila berada lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Meskipun tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 terus mengalami penurunan puncaknya pada tahun 2013 sebesar 12,5 persen. Tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada tahun yang sama justru mengalami kenaikan dari tahun 2012 sebesar 13,08 persen naik menjadi 15,03 persen pada tahun 2013.

Sementara itu kondisi tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila sendiri masih belum merata, dan sebagian besar tingkat kemiskinannya masih tinggi. Terdapat tiga Kota/Kabupaten yang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan dibawah 10 persen, yaitu Kota Surabaya 6,58 persen, Kota Mojokerto 6,89 dan Kabupaten Sidoarjo 6,97, sedangkan yang lainnya diatas 10 persen yaitu Kabupaten Gresik 15,33 persen, Kabupaten Bangkalan 26,22 persen, Kabupaten Mojokerto 11,38 persen dan Kabupaten Lamongan 17,41 persen.

Dibalik perekonomian yang tinggi di Gerbangkertasusila juga terdapat ketimpangan dalam masalah ketenagakerjaan salah satunya adalah masalah pengangguran.

Gambar 2: Tingkat Pengangguran di Gerbangkertasusila dan Jawa Timur Tahun 2009-2013 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2014 (diolah)

Tingkat pengangguran terbuka di Gerbangkertasusila masih cukup tinggi karena rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Gerbangkertasusila masih diatas 5 persen. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka normal di suatu wilayah adalah tidak lebih dari 4 persen. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Gerbangkertasusila lebih tinggi dari tingkat pengangguran di Jawa timur (Wijaya, 2014).

Sumarsono (2003) dalam Prastyo (2010) mengatakan bahwa kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap kemiskinan, gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM), sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh.

Tabel 1: Perkembangan Upah Kabupaten/Kota di Gerbangkertasusila 2009-2013 (Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Gresik	971.624	1.010.400	1.115.000	1.257.000	1.740.000
Kab. Bangkalan	715.000	775.000	850.000	885.000	983.800
Kab. Mojokerto	971.624	1.009.150	1.105.000	1.234.000	1.700.000
Kota Mojokerto	760.000	805.000	835.000	875.000	1.040.000
Kota Surabaya	948.500	1.031.500	1.115.000	1.257.000	1.740.000
Kab. Sidoarjo	955.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000
Kab. Lamongan	760.000	875.000	900.000	950.000	1.075.700

Sumber : Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur (2009-2013)

Tabel 1 menunjukkan bahwa sampai tahun 2013 tingkat upah minimum di Kabupaten/kota Gerbangkertasusila terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 upah Kabupaten/Kota tertinggi terdapat di Kota Surabaya dan Gresik 1.740.000 rupiah dan upah minimum Kabupaten/kota terendah terdapat di Kabupaten Bangkalan 983.000 rupiah.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain, serta suramnya masa depan bangsa dan Negara. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh Negara, terutama di Negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia ini bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi.

Definisi kemiskinan juga dikemukakan oleh berbagai pakar, salah satu diantaranya adalah pemenang hadiah Nobel Amartya Sen dalam Bappenas, (2008:12) yang menyebutkan unsur dasar kondisi kemiskinan adalah tidak adanya kebebasan dan perlindungan politik, ekonomi, dan sosial sehingga masyarakat miskin tidak dapat mengembangkan kemampuan dan potensi yang mereka miliki.

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai *“Poverty is lack of shelter. Poverty is being sick and not being able to see a doctor. Poverty is not being able to go to school and not knowing how to read. Poverty is not having a job, is fear of the future, living one day at the time. Poverty is losing a child to illness brought about by unclean water. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom”*. Kemiskinan berkenaan dengan ketiadaan tempat tinggal, sakit dan tidak mampu untuk berobat ke dokter, tidak mampu untuk sekolah dan tidak tahu baca tulis. Kemiskinan adalah bila tidak memiliki pekerjaan sehingga takut menatap masa depan, tidak memiliki akses akan sumber air bersih. Kemiskinan adalah ketidak berdayaan, kurangnya representasi kebebasan. Lebih sederhana, Bank Dunia (2000) mengartikan bahwa kemiskinan adalah kekurangan, yang sering diukur dengan tingkat kesejahteraan.

Maipata (2014) Agar lebih mudah menentukan seseorang atau suatu rumah tangga termasuk golongan miskin atau tidak, diperlukan suatu patokan yang disepakati atau ditetapkan. Berdasarkan patokan inilah dipetakan posisi setiap individu atau rumah tangga, apakah berada di atas, di bawah, serta seberapa jauh posisinya di atas atau di bawah patokan. Patokan inilah yang disebut dengan garis kemiskinan (GK).

Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Sedangkan garis kemiskinan non makanan merupakan nilai kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Dengan demikian, garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan, atau secara matematis dituliskan :

$$GK = GKM + GKMN \quad (1)$$

Dimana :

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKMN = Garis Kemiskinan Non Makanan

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Jadi teori pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah suatu kriteria (yang logis) mengenai bagaimana proses pertumbuhan terjadi. (Boediono, 1981).

Menurut Todaro (2000), ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiganya adalah:

1. Akumulasi modal (*capital accumulation*) termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (*human resources*). terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku meningkatkan stok modal (*capital stock*). Investasi harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi infrastruktur ekonomi dan sosial. Contohnya adalah pembangunan jalan-jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi dan sebagainya, yang kesemuanya itu mutlak dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia juga dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia.
2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestik nya lebih besar.
3. Kemajuan Teknologi (*technological progress*). Kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada tiga klasifikasi kemajuan teknologi, yaitu :
 - a. Kemajuan teknologi yang netral (*neutral technological progress*) terjadi apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama.
 - b. Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja (*labor saving technological progress*), yaitu menghemat pemakaian modal atau tenaga kerja. Tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input yang sama.

- c. Kemajuan teknologi hemat modal (*capital-saving technological progress*), terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

Banyak terdapat teori tentang pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Teori Adam Smith

Boediono (1981) Garis besar dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith agar intinya mudah untuk ditangkap dibedakan dua aspek utama yaitu :

- A. Pertumbuhan Output, Smith melihat sistem suatu Negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu :

- a. Sumber-sumber alam yang tersedia (atau faktor produksi “tanah”), menurut dia, sumber-sumber alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat, jumlah sumber-sumber alam yang tersedia merupakan *batas* maksimum bagi pertumbuhan perekonomian tersebut. Artinya, selama sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, yang memegang peranan dalam proses produksi adalah dua unsur produksi yang lain, yaitu jumlah penduduk dan stok kapital yang ada. Dua unsur lain inilah yang menentukan besarnya output masyarakat dari tahun ke tahun.
- b. Sumber-sumber manusiawi (atau jumlah penduduk). Dalam proses pertumbuhan output unsur ini dianggap mempunyai peranan yang pasif, dalam arti bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari masyarakat tersebut
- c. Stok barang Kapital yang ada, yang secara aktif menentukan tingkat output. Smith memang memberikan peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital atau akumulasi kaptal dalam proses pertumbuhan output. Apa yang terjadi dengan tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital, dan laju pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok kapital (tentu saja sampai tahap pertumbuhan dimana sumber-sumber alam mulai membatasi).

- B. Pertumbuhan penduduk

Aspek kedua dari pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk. Disebutkan diatas bahwa penduduk bersifat “pasif” dalam proses pertumbuhan output, dalam arti bahwa, dalam jangka panjang, berapapun jumlahnya tenaga kerja yang dibutuhkan oleh proses produksi akan tersedia melalui pertumbuhan penduduk. Smith mempunyai teori pertumbuhan penduduk yang tidak banyak berbeda dengan teori kependudukan dari Thomas Malthus yang terkenal itu, meskipun Smith justru mengungkapkan lebih dahulu daripada Malthus.

Menurut Smith, penduduk meningkat apabila tingkat upah yang berlaku lebih tinggi daripada tingkat upah subsistensi, yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk seseorang agar bias mempertahankan hidupnya. Apabila tingkat upah berada diatas tingkat substensi, maka orang-orang akan kawin pada umur lebih muda, kematian anak-anak berkurang dan jumlah kelahiran bertambah. Sebaliknya jumlah penduduk akan berkurang apabila tingkat upah yang berlaku jatuh dibawah tingkat upah substensi. Dalam keadaan ini kematian anak-anak meningkat dan banyak perkawinan ditunda.

2. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan pengembangan dari teori makro Keynes. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak mengungkap masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang. Sedangkan teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan mantap (*steady growth*). Menurut Harrod-Dommar, pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui proses akumulasi tabungan (Arsyad, 2010).

3. Teori Solow-Swan

Menurut Solow-Swan dalam Wiguna (2013) pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan teori ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis ekonomi klasik yaitu perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan tingkat pemanfaatan penuh (*full utilization*) dari faktor produksinya. Dengan kata lain, perekonomian akan terus berkembang dan semuanya itu tergantung pada penambahan penduduk, akumulasi kapital dan kemajuan teknologi. teori pertumbuhan Solow-Swan juga dapat disajikan kedalam bentuk fungsi produksi Cobb-Douglass, dimana *output* merupakan fungsi dari tenaga kerja dan modal. Sedangkan tingkat kemajuan teknologi merupakan variabel eksogen. Asumsi yang digunakan dalam model Solow-Swan adalah skala pengembalian yang konstan, substitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) bersifat sempurna, dan adanya produktivitas marginal yang semakin menurun (*diminishing marginal productivity*) dari tiap input-nya.

Fungsi produksi Cobb-Douglass dapat digambarkan sebagai berikut :

$$Q_t = T_t K_t^a L_t^b \quad (2)$$

Dimana :

Q_t = tingkat produksi pada tahun t

T_t = tingkat teknologi pada tahun t

K_t = jumlah stok barang modal pada tahun t

L_t = jumlah tenaga kerja pada tahun t

a = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal

b = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja

Upah

Upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 upah minimum ditetapkan secara minimum regional, sektor regional maupun sub sektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah. Dalam hal ini upah minimum adalah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.

Teori upah efisiensi (*efficiency-wage*) menyatakan upah yang tinggi membuat pekerja lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah akan menurunkan tagihan upah perusahaan, itu juga akan menurunkan produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Teori upah-efisiensi yang pertama menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Pengaruh upah terhadap efisiensi pekerja dapat menjelaskan kegagalan perusahaan untuk memangkas upah meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. Meskipun akan mengurangi tagihan upah perusahaan, maka pengurangan upah akan memperendah produktivitas pekerja dan laba perusahaan.

Teori upah-efisiensi yang kedua, menyatakan bahwa upah yang tinggi menurunkan perputaran tenaga kerja. Dengan membayar upah yang tinggi, perusahaan mengurangi frekuensi pekerja yang keluar dari perkerjaan, sekaligus mengurangi waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menarik dan melatih pekerja baru.

Teori upah efisiensi yang ketiga mengatakan bahwa kualitas rata-rata tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang dibayar kepada karyawannya. Jika perusahaan mengurangi upahnya, maka pekerja terbaik bias mengambil pekerjaan di tempat lain, meninggalkan perusahaan dengan pekerja yang tidak terdidik yang memiliki lebih sedikit alternatif.

Teori upah-efisiensi yang keempat menyatakan bahwa upah yang tinggi meningkatkan upaya pekerja. Teori ini mengaskan bahwa perusahaan tidak dapat memantau dengan sempurna upaya para pekerja, dan para pekerja harus memutuskan sendiri sejauh mana mereka akan bekerja keras. Semakin tinggi upah, semakin besar kerugian bagi pekerja bila mereka sampai dipecat. Dengan membayar upah yang lebih tinggi, perusahaan memotivasi lebih banyak pekerja agar tidak bermalas-malasan dengan demikian meningkatkan produktivitas mereka. Meskipun keempat teori upah-efisiensi ini secara rinci

berbeda, namun teori-teori tersebut menyuarakan topik yang sama: karena perusahaan beroperasi lebih efisien jika membayar pekerjanya dengan upah yang tinggi, maka perusahaan dapat menganggap bahwa memertahankan upah di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan adalah menguntungkan.

Pengangguran

Yang dimaksud dengan pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif dalam mencari pekerjaan. Kategori yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia dan masa kerja. Usia kerja biasanya adalah usia yang tidak dalam masa sekolah tapi di atas usia anak-anak (relatif I atas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD-tamat SMU), sedangkan di atas usia 18 namun masih sekolah dapat dikategorikan sebagai penganggur meski untuk hal ini masih banyak yang memperdebatkannya. (Putong, 2013).

Berdasarkan ciri penangguran yang berlaku, pengangguran dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Pengangguran terbuka, pengangguran ini tercipta akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu.
2. Pengangguran tersembunyi, pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara lain faktor yang perlu dipertimbangkan adalah: besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai.
3. Pengangguran bermusim, pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para pesawah tidak dapat mengerjakan tanahnya.
4. Setengah menganggur, di Negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur atau dalam bahasa Inggris: *underemployed*. Dan jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*.

Menurut Arsyad (1997) dalam Wiguna (2013) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di Negara yang sedang berkembang. Tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata memiliki hubungan yang berkaitan. Bagi para tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerjadengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Namun demikian, adalah salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Masyarakat miskin pada umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, melemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, serta melemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga. Oleh karena itu, salah satu mekanisme pokok untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara sedang berkembang adalah memberikan upah yang memadai dan menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat miskin.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang kemiskinan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain:

1. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) dengan judul *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Variabel yang digunakan adalah tingkat kemiskinan, PDRB pertanian, PDRB industry, inflasi, lulusan SMP, lulusan SMA, dan dummy krisis ekonomi tahun 1995 sampai 2005 di 26 Provinsi.
2. Van Indra Wiguna (2013) dengan judul *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010*. Variabel yang digunakan adalah Presentase jumlah Penduduk Miskin, PDRB, pendidikan, pengangguran yang ada di Jawa Tengah.
3. Fatkhul Mufid Cholili (2014) dengan judul *Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia)*. Variabel yang digunakan adalah Jumlah penduduk miskin, Indeks pembangunan manusia, tingkat PDRB, jumlah pengangguran.
4. Renta Yustie dan Unggul Heriqbaldi (2014) dengan judul *Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011*. Variabel yang digunakan adalah Tingkat kemiskinan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/kota di Jawa Timur

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Satuan Wilayah Pembangunan I Jawa Timur yang merupakan gabungan dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan dengan kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2009-2013. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pengangguran terbuka dan data kemiskinan untuk masing-masing Kota/Kabupaten. Variabel independen dalam dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran terbuka. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu regresi data panel dengan pendekatan fixed effect, menggunakan uji asumsi klasik, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas yang menggunakan program Eviews 7. Sehingga model fungsi yang digunakan adalah:

$$TK_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 PE_{it} + \alpha_2 UMK_{it} + \alpha_3 TPT_{it} + \mu_{it} \quad (3)$$

Dimana :

TK	= tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila
Y	= Pertumbuhan ekonomi di Gerbangkertasusila
UMK	= upah minimum Kota/Kabupaten di Gerbangkertasusila
TPT	= tingkat pengangguran terbuka di Gerbangkertasusila
α_0	= intersep
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$	= koefisien regresi variabel bebas
μ_{it}	= komponen error di waktu t untuk unit <i>cross section</i> i
i	= 1, 2, 3, ..., 7 (Kota/Kabupaten di Gerbangkertasusila)
t	= 1, 2, 3 (data <i>time series</i> tahun 2009-2013)

D. ANALISIS PEMBAHASAN

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2005), uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah di dalam model regresi terjadi hubungan korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu. Autokorelasi muncul karena residual yang tidak bebas antar satu observasi ke observasi lainnya (Kuncoro, 2011). Hal ini disebabkan karena error pada individu cenderung mempengaruhi

individu yang sama pada periode berikutnya. Masalah autokorelasi sering terjadi pada data *time series* (runtut waktu). Deteksi autokorelasi pada data panel dapat melalui uji Durbin-Watson. Nilai uji Durbin-Watson dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson untuk mengetahui keberadaan korelasi positif atau negatif (Gujarati, 2012). Keputusan mengenai keberadaan autokorelasi sebagai berikut :

- a) Jika $d < dl$, berarti terdapat autokorelasi positif
- b) Jika $d > (4 - dl)$, berarti terdapat autokorelasi negatif
- c) Jika $du < d < (4 - dl)$, berarti tidak terdapat autokorelasi
- d) Jika $dl < d < du$ atau $(4 - du)$, berarti tidak dapat disimpulkan

Tabel 2: Hasil Uji Autokolerasi

Autokolerasi Positif	Tidak Dapat Didefinisikan	Bebas Autokolerasi	Tidak Dapat Diputuskan	Autokolerasi Negatif
1.2833	1.6528	2.1917	2.3472	
Observasi	: 35			
k	: 3			
dL	: 1.2833			
dU	: 1.6528			
Durbin-Watson stat	: 2.191710			

Sumber: Data diolah melalui Eviews (2015)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa $du < d < (4 - dl)$ atau $1.6528 < 2.191710 < 2.716$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini tidak ada autokolerasi.

4.2.2 Asumsi Heterokedastisitas

Heterokedastisitas timbul apabila nilai residual dari model tidak memiliki varians yang konstan. Artinya, setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda-beda akibat perubahan kondisi yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam model (Kuncoro, 2011). Gejala ini sering terjadi pada data *cross section* (Gujarati, 2012), sehingga sangat dimungkinkan terjadi heterokedastisitas pada data panel.

Tabel 3: Hasil Uji Asumsi Heterokedastisitas

Chi square	R-squared	n * R-squared
49.802	0.988042	34.58147

Sumber: Data diolah melalui Eviews (2015)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa $n * R\text{-squared} < \text{tabel chi square}$ atau $34.58147 < 49.802$. Sehingga dapat disimpulkan model dalam penelitian ini tidak ada heterokedastisitas.

Pengujian Kriteria Statistika

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefesiensi determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau presentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati 2003). Berdasarkan model regresi yang diolah melalui program Eviews dapat diestimasi nilai *Adjust R²* dari hasil persamaan model sebagai berikut ini:

Tabel 4: Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.989792
Adjusted R-squared	0.986118

Sumber : Data diolah melalui Eviews (2015)

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *Adjust R-squared* adalah sebesar 0.986118. hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian atau kemampuan variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 98.6118 persen, dan sisanya 1.3882 persen dipengaruhi variabel yang berada diluar model.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5$ persen atau 0,05 persen dimana tingkat signifikansinya ditentukan dengan nilai probabilitas $< 0,05$ persen atau dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Hipotesa nol (H_0) akan diterima atau ditolak. Jika nilai probabilitas $< \alpha$ (0,05 persen) maka H_0 ditolak atau variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Begitu sebaliknya jika nilai probabilitas $> \alpha$ (0,05 persen) maka H_0 diterima atau variabel independen tersebut berpengaruh akan tetapi tidak signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 5: Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Prob.
C	78.39098	0.0000
PE?	-1.355647	0.0000
LOGUMK?	-8.667069	0.0009
TPT?	0.697321	0.0001

Sumber : Data diolah melalui Eviews (2015)

1) Uji Parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Berdasarkan tabel 5 bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila yang ditunjukan oleh nilai koefisien PE sebesar -1.355647. Arti dalam besaran koefisien tersebut adalah apabila pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila akan turun sebesar -1.355647 persen. Selain itu nilai probabilitas yang dimiliki PE adalah 0.0000 atau lebih kecil dari α (0,05), hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak atau Pertumbuhan ekonomi secara individual berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila.

2) Uji parsial terhadap upah minimum Kota/Kabupaten (LOGUMK)

Berdasarkan tabel 5 Bahwa upah minimum Kota/Kabupaten berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila yang ditunjukan oleh nilai koefisien LOGUMK sebesar -8.667069. Arti dalam besaran koefisien tersebut adalah apabila upah minimum Kota/Kabupaten naik sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila akan turun sebesar -8.667069 persen. Selain itu nilai probabilitas yang dimiliki LOGUMK adalah 0.0009 atau lebih kecil dari α (0,05), hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak atau Upah minimum Kota/Kabupaten secara individual berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila.

3) Uji parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT)

Berdasarkan tabel 5 Bahwa Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila yang ditunjukkan oleh nilai koefisien TPT sebesar 0.69732. Arti dalam besaran koefisien tersebut adalah apabila tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila akan naik sebesar 0.69732 persen. Selain itu nilai probabilitas yang dimiliki TPT adalah 0.0001 atau lebih kecil dari α (0,05), hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak atau tingkat pengangguran terbuka secara individual berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila.

Uji Simultan (F-statistik)

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji simultan (uji F). pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Algifari, 2000). Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, menggunakan uji F. Apabila nilai F hitung > F tabel maka H_0 ditolak dan menerima H_1 . Artinya ada pengaruh variabel independen secara bersama—sama terhadap variabel dependen, dan sebaliknya bila, F hitung < F tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. (Imam Ghozali, 2005).

Tabel 6: Hasil Uji Simultan

F-statistic	269.3492
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah melalui Eviews (2015)

Dalam tabel 6 menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik adalah 0.000000 atau lebih kecil dari α (0.05). berdasarkan hasil tersebut maka H_0 ditolak atau variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum Kota/Kabupaten, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila.

Uji Kesesuaian Model

Estimasi Model *Fixed Effect Model* (FEM) dan Estimasi *Random Effect Model* (REM)

Estimasi model *fixed effect* dan *random effect* ini dilakukan melalui pengujian *F-test* dan *Chi-square*. Jika *p-value* lebih kecil dari α sebesar 5 persen atau 0,05. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian maka:

H_0 : model mengikuti model *pool*

H_1 : model mengikuti model *fixed*

Hasil estimasi model *fixed* adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil tes uji kesesuaian model. Nilai *cross-section F* sebesar 0.0000 dan *Cross-section chi square* sebesar 0.000. nilai ini kurang dari α sebesar 5 persen atau 0,05. sehingga H_0 ditolak dan menerima H_0 sehingga model mengikuti *fixed effect model*.

Tabel 7: Hasil Regresi Menggunakan *Fixed Effect Model*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	224.888714	(6,25)	0.0000
Cross-section Chi-square	140.239661	6	0.0000

Sumber : Data diolah melalui Eviews (2015)

Pembahasan Hasil Estimasi dan Analisis Data

Berdasarkan hasil dari uji asumsi klasik yang telah dilakukan maka model penelitian dikatakan BLUE. Karena dari kedua tes uji asumsi klasik data dan variabel yang digunakan bebas dari asumsi autokolerasi dan heterokedastisitas. Hasil dari uji autokolerasi yaitu variabel yang digunakan tidak ada kolerasi antar kurun waktu, sedangkan data yang digunakan bebas dari heteroskedastisitas atau data yang digunakan telah sama/homokedastisitas.

Setelah uji asumsi klasik telah lolos selanjutnya model dilakukan uji statistik. Dimana uji statistik ini untuk melihat hubungan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependennya, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Selain itu dalam uji statistik ini terdapat koefisien determinasi dimana koefisien ini menjelaskan kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

Hasil uji statistik yang telah dilakukan diketahui bahwa model yang digunakan mendapatkan hasil koefisien determinasi sebesar 98.6118 persen. Berdasarkan hasil tersebut bahwa model yang digunakan mempunyai kemampuan 98.6118 persen variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Selanjutnya tiga variabel independen yang digunakan diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum Kota/Kabupaten, dan tingkat pengangguran terbuka dilakukan uji parsial dan uji simultan.

Dalam uji parsial mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum Kota/Kabupaten berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila. Sedangkan uji simultan mendapatkan hasil bawa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila.

Setelah melakukan kedua uji tersebut, hasil pengolahan data menggunakan regresi linier berganda dimasukan ke dalam model persamaan. Adapun hasil regresi menggunakan OLS adalah sebagai berikut:

Tabel 8: Hasil Regresi OLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	78.39098	13.41562	5.843262	0.0000
PE	-1.355647	0.259676	-5.220536	0.0000
UMK	-8.667069	2.297011	-3.773195	0.0009
TPT	0.697321	0.153620	4.539261	0.0001
Fixed Effects (Cross)				
_GRES--C	4.116702			
_BANG--C	11.31902			
_KMKT--C	-1.962196			
_MKT--C	-6.125979			
_SBY--C	-4.995393			
_SDJ--C	-5.623855			
_LMG--C	3.271698			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.989792	Mean dependent var		13.27629
Adjusted R-squared	0.986118	S.D. dependent var		7.164747
S.E. of regression	0.844177	Akaike info criterion		2.734046
Sum squared resid	17.81585	Schwarz criterion		3.178431
Log likelihood	-37.84581	Hannan-Quinn criter.		2.887448
F-statistic	269.3492	Durbin-Watson stat		2.191710
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah melalui Eviews (2015)

Berdasarkan hasil regresi liner berganda pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum Kota/Kabupaten, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila tahun 2009-2013 dimasukan kedalam sebuah model adalah sebagai berikut:

$$K = 78.39098 - 1.355647 PE - 8.667069 UMK + 0.697321 TPT$$

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Gerbangkertasusila Tahun 2009-2013

Nilai koefisien regresi pada variabel pertumbuhan ekonomi (PE) adalah 1.355647 yang artinya apabila variabel pertumbuhan ekonomi bertambah 1 persen akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan (K) sebesar 1.355647. tanda negatif (-) menunjukkan adanya hubungan berlawanan antara variabel pertumbuhan ekonomi (PE) dengan tingkat kemiskinan (K).

Dari hasil regresi dan model tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kuznet dalam Siswanti (2009) yang menyatakan bahwa pada awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat akhir jumlah orang atau penduduk miskin berangsur berkurang. Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat perkembangan dan struktur perekonomian di suatu daerah.

Menurut Siregar dan Wahyunarti (2008) mengatakan bahwa pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menurunkan jumlah kemiskinan yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah.

Menurut Siregar (2006) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintahan yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur yang padat modal.

Ketika perekonomian berkembang disuatu kawasan atau daerah, terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik diantara penduduk kawasan tersebut maka akan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang positif di Gerbangkertasusila memberikan dampak yang bagus terhadap perekonomian yang nantinya dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus meningkat disetiap tahunnya di suatu wilayah atau daerah akan meningkatkan kapasitas perekonomian, yang nantinya akan menciptakan lapangan kerja baru dan peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga pendapatan akan meningkat dan mengurangi resiko seseorang terjatuh dalam kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian dapat diterima.

Pengaruh Upah Minimum Kota/Kabupaten Terhadap Tingkat Kemiskinan di Gerbangkertasusila Tahun 2009-2013

Nilai koefisien regresi pada variabel upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) adalah 8.667069 yang artinya apabila variabel upah minimum Kota/Kabupaten bertambah 1 persen akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan (K) sebesar 8.667069. tanda negatif (-) menunjukkan adanya hubungan berlawanan antara variabel upah minimum Kota/kabupaten (UMK) dengan tingkat kemiskinan (K).

Hasil ini sesuai dengan tujuan penetapan upah minimum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga terbebas dari kemiskinan. Penetapan upah minimum yang mendekati Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan diatas garis kemiskinan telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila.

Upah minimum yang tiap tahunnya meningkat dapat memberikan standar pengupahan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada para karyawan sehingga para karyawan mempunyai upah/gaji minimum yang setiap tahunnya telah ditentukan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat merupakan perlindungan bagi para pekerja agar tidak terjatuh dalam kemiskinan. Karena perhitungan upah minimum sudah disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak yang dibutuhkan oleh seorang pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian dapat diterima.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Gerbangkertasusila Tahun 2009-2013

Nilai koefisien regresi pada variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah 0.697321 yang artinya apabila variabel tingkat pengangguran terbuka bertambah 1 persen akan menyebabkan

kenaikan tingkat kemiskinan (K) sebesar 0.697321. tanda positif (+) menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) dengan tingkat kemiskinan (K).

Hasil dari regresi sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Menurut Sukirno (1997) dalam Cholili (2014), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu Negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran dapat terjadi dikarenakan adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan kepada para pekerjanya yang menyebabkan pekerja tersebut tidak memiliki pendapatan dan rentan hidup dibawah garis kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian dapat diterima.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum Kota/Kabupaten, dan pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila tahun 2009-2013. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum Kota/Kabupaten dan tingkat pengangguran terbuka
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Karena kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Ketika suatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka diharapkan memiliki tingkat kemiskinan yang rendah.
3. Upah minimum Kota/Kabupaten berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Upah minimum yang tiap tahunnya meningkat dapat memberikan standar pengupahan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada para karyawannya sehingga para karyawannya mempunyai upah/gaji minimum yang setiap tahunnya telah ditentukan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat merupakan perlindungan bagi para pekerja agar tidak terjerat dalam kemiskinan.
4. tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Pengangguran dapat terjadi dikarenakan adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan kepada para pekerjanya yang menyebabkan pekerja tersebut tidak memiliki pendapatan dan rentan hidup dibawah garis kemiskinan. Tingkat pengangguran yang naik akan berpengaruh terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin begitu pula sebaliknya.

Saran

Dari hasil-hasil temuan penelitian, maka beberapa implikasi terhadap kebijakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian, didapat bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sehingga kedepannya dilaksanakan pembangunan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja tetapi dikhususkan pada pemerataan sehingga dapat diharapkan bahwa tingkat kemiskinan yang ada di daerah secara bertahap dapat diturunkan dan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dengan melakukan pemerataan pembangunan perekonomian pada Gerbangkertasusila agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh lebih cepat dan merata, tidak hanya terpusat di daerah-daerah tertentu saja. Pemerintah dan masyarakat harus mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Serta pemerintah diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik sehingga para investor tertarik

- untuk menanamkan modal nya dan belanja pemerintah dapat meningkat, khususnya belanja di bidang infrastruktur. Karena dengan penunjang infrastruktur yang lengkap di suatu daerah dapat membuat para investor tertarik menanamkan modalnya.
2. Penetapan upah minimum harus tetap diberlakukan dan tingkat upah nya dinaikan sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) untuk melindungi pekerja. Karena diharapkan dengan upah minimum yang ada di suatu daerah dapat melindungi para pekerja nya dari kemiskinan. Karena dengan upah minimum seorang pekerja menerima upah yang sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak serta dapat terhindar dari garis kemiskinan. Upah minimum Kota/Kabupaten tiap tahun nya naik sesuai dengan kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah.
 3. Tingkat pengangguran yang masih tinggi membutuhkan upaya yang serius untuk menurunkan nya. Dikarenakan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Untuk mengurangi tingkat pengangguran pemerintah dan pihak yang terkait diharapkan melakukan berbagai upaya diantaranya adalah ijin pendirian usaha agar nantinya dapat menyerap tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap. Memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat agar nantinya masyarakat dapat bersaing di dunia kerja, meningkatkan kewirausahaan yang dibekali dengan pelatihan khusus dan meningkatkan tingkat pendidikan sehingga keahlian yang dimiliki oleh pekerja dapat meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga artikel ilmiah ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih khusus penulis sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan artikel ini bias dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (JIMFEB).

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. *Indikator Ekonomi Buletin statistik Bulanan Maret 2014*.
- Badan Pusat Statistik. *Indikator Ekonomi Buletin Statistik Bulanan Agustus 2011*.
- Bank Dunia. (2000). *World Development Report 2000/2001 : Attacking Poverty*. Washington, DC: World Bank.
- Boediono. 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Bappenas. 2008. *Buku Panduan Perencanaan dan Pengangguran yang Berpihak pada masyarakat Miskin*. Jakarta.
- Cholili, F.M. 2014. *Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics, Fourth Edition*. New York: McGraw-Hill Companies.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Jonaidi, Arius. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol.1, (No.1).

- Kuncoro, Mudrajat. 2011. *Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis & Ekonomi)*. 4th ed. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.4/1996 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47/1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Prastyo, Adit Agus. 2010. *Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Putong, Iskandar. 2013. *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Mitra Wacana Media.
- Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti, 2008. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Siswanti. 2009. *Pengaruh PDRB dan IPM terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Todaro , Michael P. 2000. *Edisi ketujuh PEMBANGUNAN EKONOMI di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jakarta.
- Wiguna, V.I, 2013. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Wijaya, Radewa Rizki Mirma. 2014. *Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Populasi Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2007-2012)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Yustie, Renata & Heriqbaldi, Unggul. 2014. *Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011*. Universitas Airlangga Surabaya.